Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 26034-26039

Tantangan dan Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Proses Perencanaan Anggaran di Kabupaten Lamongan

Fasihah Habibah Aulia[1], Febiola Hengrida Almayra[2], Eva Hany Fanida[3], Melda Fadiyah Hidayat[4]
[1,2,3,4]Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya
Corresponding Author: Fasihah Habibah Aulia, E-Mail: 25040674319@mhs.unesa.ac.id

Published: Mei, 2026

ABSTRAK
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia untuk meningkatkan kejelasan, tanggung jawab, serta penghematan dalam mengelola uang daerah. Penerapan SIPD di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Lamongan, merupakan bagian penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan SIPD serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam implementasinya pada proses perencanaan anggaran daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan cara membaca dan menganalisis berbagai literatur serta dokumen kebijakan yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD berhasil meningkatkan penggabungan data, kejelasan dalam perencanaan, dan efisiensi dalam proses membuat anggaran. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, hambatan teknis sistem, serta proses adaptasi dari sistem lama ke sistem digital. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kemampuan pegawai, dukungan akan infrastruktur teknologi, serta penguatan kerja sama antar lembaga di daerah agar pelaksanaan SIPD bisa berjalan lebih baik.

Kata kunci: SIPD, perencanaan anggaran, pemerintah daerah, efektivitas kebijakan.

ABSTRACT
The District Government Information System (SIPD) is a system developed by the Indonesian Ministry of Home Affairs to improve transparency, accountability, and efficiency in the management of local government finances. The implementation of SIPD in various regions, including Lamongan Regency, plays an important role in the process of regional planning and budgeting. This study aims to analyze the effectiveness of SIPD and identify various challenges that arise during its implementation in the regional budgeting process. The research method used is a qualitative approach through literature study and policy analysis. The research results show that implementing SIPD can improve data integration, planning transparency, and the efficiency of the budgeting process. However, its implementation still faces several challenges, such as limited human resources, technical system issues, and the process of adapting from the old system to the digital system. Thus, efforts have been made to enhance the capacity of civil servants, support technological infrastructure, and strengthen coordination among local governments to ensure the optimal implementation of SIPD.

Keyword: SIPD, budget planning, local government, and policy effectiveness.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan juga sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Dalam era digital saat ini, masyarakat mengharapkan adanya sistem pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, dan terbuka. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti SIPD menjadi salah satu strategi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Implementasi SIPD juga merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk melakukan standarisasi sistem perencanaan dan penganggaran di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Dengan adanya sistem yang terintegrasi secara nasional, proses perencanaan pembangunan daerah dapat lebih mudah diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional. Hal ini penting agar program dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah daerah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, keberadaan SIPD memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap pola kerja aparatur pemerintah daerah.

Aparatur dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan sistem kerja yang lebih modern dan berbasis teknologi informasi. Proses perencanaan yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual kini beralih ke sistem digital yang memerlukan ketelitian, ketepatan data, serta pemahaman terhadap mekanisme pengoperasian sistem. Perubahan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memastikan bahwa seluruh aparatur yang terlibat mampu menjalankan sistem dengan baik. Di sisi lain, implementasi SIPD juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya data yang tersimpan secara sistematis dalam sistem, pemerintah daerah dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap kebutuhan pembangunan masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun program dan kegiatan pembangunan yang lebih tepat sasaran serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Melalui penerapan sistem yang terintegrasi seperti SIPD, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan proses perencanaan dan penganggaran sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efisien dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas implementasi SIPD menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana sistem ini mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam proses perencanaan anggaran di Kabupaten Lamongan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan anggaran di Kabupaten Lamongan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial dan administratif yang terjadi dalam penerapan SIPD, khususnya yang berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, maupun ketersediaan sumber daya. Metode studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu daerah tertentu sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih terarah, mendalam, dan kontekstual sesuai kondisi nyata di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi SIPD dalam proses perencanaan anggaran daerah. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan penerapan sistem, tetapi juga menganalisis sejauh mana SIPD mampu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas implementasi SIPD beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipercaya, seperti peraturan perundang-undangan terkait SIPD, buku ilmiah, jurnal penelitian, serta dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

Data tersebut digunakan sebagai dasar analisis dan penguatan landasan teoritis penelitian.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen, laporan, serta literatur yang relevan. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan memilih sumber yang memiliki kredibilitas tinggi agar data yang diperoleh akurat dan mendukung analisis penelitian.Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengorganisasian data, pengelompokan berdasarkan tema seperti efektivitas, manfaat, dan kendala implementasi SIPD, serta interpretasi data untuk menemukan pola, hubungan, dan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan secara berkelanjutan dengan membandingkan berbagai sumber data.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai referensi seperti peraturan, buku, jurnal, dan dokumen resmi. Selain itu, dilakukan pengecekan ulang terhadap data agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan keterkaitan antara temuan yang diperoleh dengan kerangka teori yang digunakan, sehingga hasil analisis tidak hanya

bersifat deskriptif tetapi juga memiliki kekuatan analitis. Dengan menghubungkan data empiris dan teori yang relevan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas implementasi SIPD, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan anggaran di Kabupaten Lamongan menunjukkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek efisiensi, transparansi, dan integrasi data. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengakses informasi secara lebih cepat, akurat, dan terpusat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Dalam waktu lima tahun terakhir, implementasi SIPD mengalami perkembangan yang cukup dinamis, mulai dari tahap adaptasi hingga optimalisasi. Berikut ini merupakan gambaran implementasi SIPD berdasarkan kondisi nyata di lapangan:

Tahun	Fokus kebijakan	Contoh implementasi SIPD	Kendala yang di hadapi	Dampak / hasil
2021	Penyesuaian anggaran pasca pandemi COVID-19	SIPD digunakan untuk realokasi anggaran ke sektor kesehatan dan bantuan sosial	Aparatur belum terbiasa menggunakan sistem digital	Perencanaan lebih responsif terhadap kondisi darurat
2022	Adaptasi sistem oleh OPD	Seluruh OPD mulai wajib input perencanaan melalui SIPD	Keterbatasan SDM dan sering terjadi error sistem	Proses perencanaan mulai terintegrasi meskipun belum optimal
2023	Integrasi dan sinkronisasi program	Penyusunan program pembangunan dilakukan terpusat dalam SIPD	Koordinasi antar OPD masih perlu penyesuaian	Mengurangi tumpang tindih program
2024	Transparansi dan akuntabilitas anggaran	Data APBD terdigitalisasi dan dapat dipantau	Infrastruktur jaringan belum merata	Pengawasan meningkat dan lebih terbuka
2025	Optimalisasi dan peningkatan kapasitas	Pelatihan (bimtek) SIPD dan penguatan sistem	Ketergantungan pada server pusat	Kinerja aparatur meningkat dan sistem lebih efektif

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pada tahap awal implementasi (2021–2022), tantangan utama terletak pada kesiapan sumber daya manusia dan aspek teknis sistem. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan tidak hanya bergantung pada keberadaan teknologi, tetapi juga pada kemampuan aparatur dalam mengoperasikannya. Kurangnya pelatihan dan adaptasi awal menyebabkan implementasi SIPD belum berjalan secara optimal. Memasuki tahun 2023–2024, implementasi SIPD mulai menunjukkan hasil yang lebih nyata, terutama dalam meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mendorong transparansi anggaran. Integrasi data dalam satu sistem memungkinkan perencanaan pembangunan menjadi lebih sinkron dan terarah, sehingga mampu mengurangi tumpang tindih program yang sebelumnya sering terjadi.

Namun demikian, secara kritis dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi SIPD belum sepenuhnya merata. Masih terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap infrastruktur teknologi dan sistem pusat, yang berpotensi menghambat kinerja apabila terjadi gangguan teknis. Selain itu, perbedaan kapasitas sumber daya manusia antar daerah juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat

keberhasilan implementasi SIPD. Pada tahap akhir (2025), implementasi SIPD mulai mengarah pada optimalisasi, ditandai dengan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan serta penguatan infrastruktur teknologi.

Meskipun demikian, diperlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sistem pendukung agar manfaat SIPD dapat dirasakan secara maksimal. Secara keseluruhan, implementasi SIPD di Kabupaten Lamongan dapat dinilai cukup efektif dalam mendukung proses perencanaan anggaran daerah. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan perbaikan berkelanjutan, terutama dalam aspek teknis, kapasitas aparatur, dan pemerataan infrastruktur teknologi. Dengan demikian, SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Contoh Perubahan dan Prioritas Anggaran Daerah (Simulasi Kabupaten Lamongan 2021–2025)

Tahun	Sektor Prioritas	Contoh Alokasi Anggaran (Estimasi)	Fokus Penggunaan	Keterkaitan dengan SIPD
2021	Kesehatan dan Bantuan Sosial	Rp450 Miliar	Penanganan COVID-19, vaksinasi, bantuan sosial	SIPD digunakan untuk realokasi cepat anggaran darurat
2022	Pemulihan Ekonomi	Rp400 Miliar	UMKM, bantuan usaha, padat karya	Data SIPD membantu identifikasi sektor terdampak
2023	Infrastruktur Dasar	Rp550 Miliar	Pembangunan jalan, irigasi, fasilitas desa	SIPD mengintegrasikan perencanaan antar OPD
2024	Pendidikan & Pelayanan Publik	Rp500 Miliar	Digitalisasi sekolah, peningkatan layanan publik	SIPD mendukung transparansi dan monitoring program
2025	Pembangunan Berkelanjutan	Rp600 Miliar	Smart city, lingkungan, penguatan desa	SIPD digunakan untuk perencanaan berbasis data jangka panjang

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi pergeseran prioritas anggaran yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, anggaran lebih difokuskan pada sektor kesehatan dan bantuan sosial sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menggunakan SIPD sebagai alat untuk melakukan realokasi anggaran secara cepat dan adaptif. memasuki tahun 2022–2023, fokus anggaran mulai bergeser ke pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pada tahap ini, SIPD berperan dalam mengintegrasikan data antar sektor sehingga program pembangunan dapat dirancang secara lebih terarah dan tidak tumpang tindih. Hal ini mencerminkan peningkatan fungsi SIPD dari sekadar alat administratif menjadi alat koordinasi kebijakan.

Selanjutnya, pada tahun 2024–2025, arah kebijakan anggaran mulai mengarah pada pembangunan jangka panjang, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan publik, serta konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, SIPD mulai dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis berbasis data. namun secara kritis, meskipun terjadi peningkatan kualitas dalam perencanaan anggaran, masih terdapat potensi ketidaksesuaian antara perencanaan dan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, kualitas data dan kapasitas aparatur menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah.

jika dikaji dari perspektif efektivitas kebijakan publik, implementasi SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai instrumen yang memengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan. Keberadaan SIPD memungkinkan proses perencanaan menjadi lebih sistematis dan berbasis data, namun efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana data tersebut diolah dan dimanfaatkan oleh aparatur pemerintah daerah. Tanpa adanya kemampuan analisis yang memadai, data yang tersedia dalam sistem tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas kebijakan. selain itu, implementasi SIPD juga mendorong perubahan budaya kerja dalam birokrasi. Aparatur dituntut untuk lebih adaptif terhadap teknologi, lebih teliti dalam penginputan data, serta lebih bertanggung jawab terhadap setiap proses perencanaan yang dilakukan. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel. Namun, perubahan budaya kerja ini tidak dapat terjadi secara instan dan memerlukan proses pembelajaran serta penyesuaian yang berkelanjutan.

Di sisi lain, keberhasilan implementasi SIPD juga sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah. Dukungan dari kepala daerah dan pimpinan OPD menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa sistem ini tidak hanya digunakan sebagai formalitas, tetapi benar-benar dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan dan penganggaran. Tanpa adanya komitmen tersebut, penggunaan SIPD berpotensi hanya menjadi kewajiban administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implementasi SIPD merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari teknologi, sumber daya manusia, hingga kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan agar sistem ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat secara luas

KESIMPULAN

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan anggaran di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa sistem ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam aspek transparansi, efisiensi, dan integrasi data. Melalui SIPD, proses perencanaan dan penganggaran menjadi lebih sistematis, terstruktur, serta berbasis data sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, implementasi SIPD mengalami perkembangan yang bertahap, mulai dari fase adaptasi hingga menuju tahap optimalisasi. Pada tahap awal, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis sistem, serta proses penyesuaian dari sistem manual ke sistem digital. Namun, seiring berjalannya waktu, implementasi SIPD mulai menunjukkan dampak positif, seperti meningkatnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berkurangnya tumpang tindih program, serta meningkatnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Meskipun demikian, secara kritis dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi SIPD belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya ketergantungan pada infrastruktur teknologi dan sistem pusat, serta belum meratanya kapasitas aparatur dalam mengoperasikan sistem secara maksimal. Selain itu, pemanfaatan data dalam SIPD sebagai dasar analisis kebijakan masih perlu ditingkatkan agar perencanaan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas data yang digunakan dalam sistem. Dengan dukungan tersebut, SIPD diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas perencanaan anggaran dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik di Kabupaten Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.* Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* Jakarta.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Jakarta.
Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
Indra Bastian. (2015). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
Abdul Halim. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mohamad Mahsun. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
Mudrajad Kuncoro. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Riant Nugroho. (2017). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Baldric Siregar. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Joko Widodo. (2018). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Malang: Bayumedia.
Bappenas. (2020). *Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta.
Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet